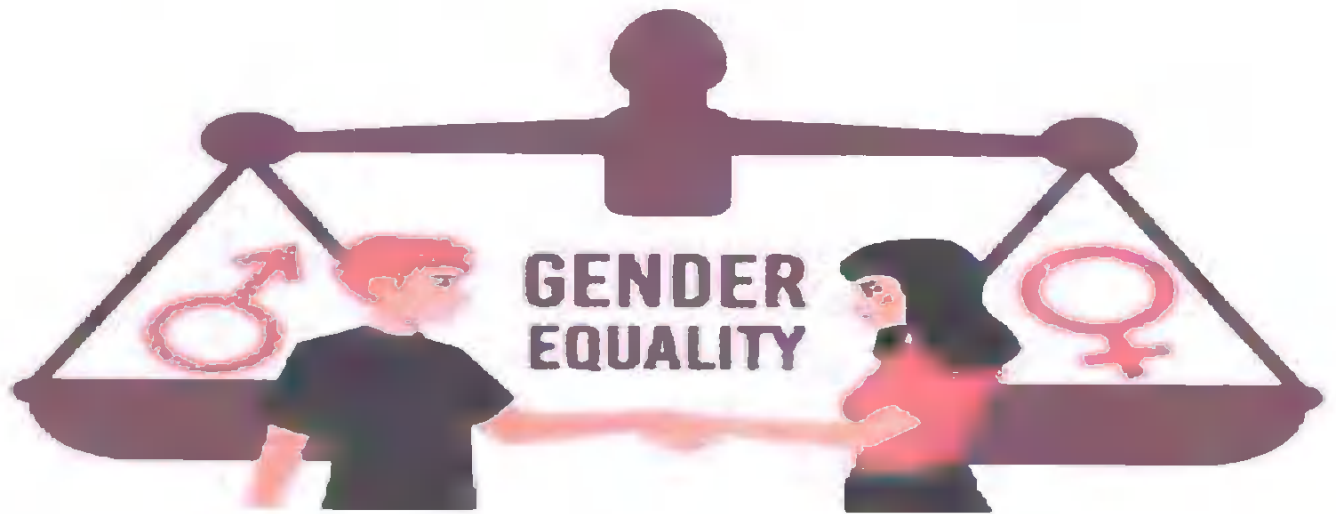




PEMERINTAH

PROVINSI SULAWESI SELATAN



LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN
PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER (PPRG) TAHUN 2021



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

Daftar isi	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Lataran Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.2 Maksud dan Tujuan	5
BAB II KEGIATAN PELAKSANAAN PERENCANAAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER	6
2.1 Program dan Kegiatan	6
2.2 Sumber dan Jumlah Anggaran	7
2.3 Hasil Yang Dicapai.....	7
2.4 Permasalahan.....	7
2.5 Upaya Penyelesaian Masalah / Rencana Tindak Lanjut	8
2.4 Kesimpulan dan Saran	9
BAB III PENUTUP.....	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gender masuk ke dalam khasanah pembangunan khususnya perencanaan pembangunan masih relatif baru, hal ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan global yang mana tertuang dalam Beijing Platform for Action (1995) yang mengimbau negara-negara yang hadir dalam Pertemuan Sedunia ke-IV di Beijing, untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam usaha pembangunannya.

PUG adalah Strategi Pembangunan yang mengintegrasikan Perspektif Gender dalam seluruh Proses Pembangunan mulai dari Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, hingga monitoring dan Evaluasi terhadap seluruh Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan. PUG ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan Gender dalam Pembangunan, yaitu Pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki – laki maupun perempuan. Kesetaraan Gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk laki – laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan.

Adapun strategi pengarusutamaan gender (PUG) ke dalam proses pembangunan dewasa ini semakin diakui sebagai kebutuhan pembangunan nasional. Hal tersebut diperkuat dengan telah disahkannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam

Pembangunan Nasional, yaitu suatu Instruksi Presiden kepada semua Menteri, Lembaga Tinggi Negara, Panglima Angkatan Bersenjata, Gubernur dan Bupati/ Walikota untuk melakukan PUG dalam keseluruhan proses perencanaan dari seluruh kebijakan dan program pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring hingga evaluasi.

Sebagai hasil dari upaya pelaksanaan PUG, khususnya pada tahap perencanaan PUG, khususnya pada tahap perencanaan, Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah yang menyatukan 2 (dua) urusan yaitu urusan perencanaan serta urusan Penelitian dan Pengembangan sehingga terbentuknya Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah dan dikarenakan terjadi Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023, maka dianggap perlu untuk Menyusun Rencana Strategi Perubahan Tahun 2018 - 2023 (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu juga tercantum dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 38 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 , dimana Peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan anak ditetapkan sebagai salah satu sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun Tujuh prasyarat dalam proses melaksanakan PUG diantaranya adalah :

- Komitmen
Komitmen pemimpin di lembaga/pemerintahan
- Kebijakan

Wujud komitmen pemerintah bagi perwujudan kesetaraan gender

- Kelembagaan
Mendukung pelaksanaan pengarusutamaan gender
- Sumber Daya
SDM dan sumber dana yang memadai
- Data Terpilah
Menurut jenis kelamin dan system
- Alat Analisis
Instrumen untuk analisis gender
- Partisipasi Masyarakat
Dorongan masyarakat kepada Pemerintah

Berkaitan dengan isu gender dalam pembangunan ini, maka hasil yang ingin dicapai adalah kesetaraan gender, yaitu kesetaraan perempuan dan laki laki dalam menikmati hasil-hasil pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, sosial-ekonomi, hukum, politik. Adapun usaha menuju arah tersebut, telah dilakukan melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan, yaitu suatu strategi yang memberi kepastian, bahwa isu yang berkaitan dengan gender teridentifikasi dan tertangani di dalam proses pembangunan agar dapat melihat, mengidentifikasi isu atau kebijakan dalam pengambilan keputusan, menyusun program dan kegiatan sebagai solusi penyelesaian masalah secara berkesinambungan dan diimplementasikan dengan cepat dan tepat.

Pelaksanaan PUG harus terefleksikan dalam proses penyusunan kebijakan yang menjadi acuan perencanaan dan penganggaran untuk menjamin program dan kegiatan yang dibuat oleh seluruh lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah menjadi responsip gender.

Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) merupakan perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu akses, partisipasi, control dan manfaat yang dilakukan secara setara antara Perempuan dan laki – laki. Hal ini berarti bahwa perencanaan dan penganggaran tersebut mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan laki laki dalam proses penyusunan maupun dalam pelaksanaan kegiatan.

1.2 Landasan Hukum

Beberapa Peraturan Perundang - undangan dan kebijakan yang terkait dengan PPRG adalah sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of Forms of Discrimination Against Women*);
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional ;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah ;
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 ;
9. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang percepatan Pelaksanaan Proritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 ;

10. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan ;
11. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional ;
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri ;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum. Pelaksanaan PengarusUtamaan Gender;
14. Surat Edaran bersama Menteri Tahun 2012 (Stranas PUG);
15. Kebijakan Daerah: PERDA Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan PPRG yaitu untuk memberi rujukan dalam pelaksanaan Percepatan PUG melalui PPRG di daerah agar lebih terarah, sistimatis dan sinergis ditingkat Daerah (Provinsi dan Kabupaten Kota)

Menjadi pedoman dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPRG di daerah yang dilaksanakan oleh BAPPENAS, KEMENDAGRI, dan KPP & PA.

**KEGIATAN PELAKSANAAN PERENCANAAN PENGANGGARAN
YANG RESPONSIF GENDER****2.1 Program dan Kegiatan**

Upaya implementasi Strategi Pengarusutamaan Gender di Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2021 diwujudkan dalam berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, diantaranya adalah sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 - b.1. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi

2.2. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber anggaran diperoleh dari APBD, dengan rincian sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Anggaran sebesar :

 - a. Anggaran Rp. 91.764.800,-
 - b. Realisasi Rp. 86.764.600,-
 - c. Sisa Pagu Anggaran Rp. 5.000.200,-
 - d. Realisasi Anggaran 94,55 %
- Program Perencanaan Pembangunan Daerah

- Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dengan
Anggara sebesar :

- a. Anggaran Rp. 1.971.297.700,-
- b. Realisasi Rp. 1.810.105.588,-
- c. Sisa Paku Anggaran Rp. 161. 192.112,-
- d. Realisasi Anggaran 91,82%

2.3 Hasil yang dicapai

Adapun pelaksanaan kegiatan pada tahun 2021, telah mencapai hasil dan tujuan yang diharapkan, yang diantaranya yaitu :

1. Meningkatnya Sumber daya Perempuan yang memahami proses dan penyusunan dokumen perencanaan;
2. Dokumen Keterampilan perempuan dalam mengakses informasi dalam menyusun dokumen perencanaan.

2.4 Permasalahan

Permasalahan dalam implementasi PUG di Sulawesi Selatan adalah :

1. Payung hukum yang menyatakan tentang keharusan melaksanakan PUG di setiap sektor/ lembaga baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, tidak tersosialisasi dengan baik;
2. PUG lebih dipahami sebagai proyek kegiatan untuk perempuan atau pemberdayaan perempuan semata, dan belum dipahami sebagai strategi pembangunan yang sifatnya *cross-cutting*, menyeluruh dan terintegrasi;

3. Data dan informasi terpilah berdasarkan jenis kelamin masih terbatas;
4. Masih kurang Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu melaksanakan analisis gender dan mendukung pelaksanaan PUG di tingkat internal.

2.5 Upaya Penyelesaian Masalah / Rencana Tindak Lanjut

Adapun untuk rencana tindak lanjut dalam penyelesaian masalah diharapkan dapat diselesaikan secara berkala dalam setiap tahunnya, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penguatan dasar hukum Pengarusutamaan Gender melalui regulasi dan Peraturan Daerah yang lebih memadai;
2. Sosialisasi semua dasar hukum tentang keharusan melaksanakan PUG yang dikeluarkan oleh Internasional, Nasional, Daerah ataupun Unit kerja;
3. Dalam pelaksanaan sosialisasi PUG dan pelatihan analisis gender diharapkan bahwa target audience sosialisasi dan pelatihan adalah yang dapat menindaklanjuti hasil sosialisasi/ pelatihan;
4. Data terpilah menurut jenis kelamin menjadi mandatori di semua bidang pembangunan;
5. Pelatihan analisis gender dalam bentuk *learning by doing* bagi driver PUG dan perencana serta pelaksana program di seluruh OPD;
6. Kegiatan sosialisasi dan *capacity building* (termasuk pelatihan analisis gender, telaah kebijakan, isu gender terkini, kemitraan, proses siklus perencanaan) dilaksanakan secara berkelanjutan dan relevant sesuai dengan kebutuhan.

2.5 Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

- Sebagai cross Issue, Pengarusutamaan Gender sangat membutuhkan koordinasi dan kerja keras lintas sektoral yang melibatkan seluruh pihak baik pemerintah maupun non pemerintah seluruh melibatkan lembaga masyarakat dan tokoh agama, akademis/ perguruan tinggi, dunia dan media.
- PPRG sangat penting untuk diimplementasikan dalam proses pembangunan untuk memastikan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan pada level pemerintah yang benar – benar tepat sasaran

Saran

- Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Pemerintah Kabupaten Kota dalam menyusun dan merencanakan anggaran yang responsif Gender.
- Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Kota dalam melakukan Pengendalian dan Evaluasi perencanaan dan penganggaran daerah.
- Agar Pembangunan PPPA tidak lagi bertolentransi pada output based activities melainkan berorientasi pada outcomes dan impact based activities. Selain itu tidak lagi bertumpu pada cara berpikir keproyekan melainkan berpikir secara sistematis, platform dan ekosistem sehingga semua pihak dan semua level saling mempengaruhi untuk bersama – sama melaksanakan PUG secara komprehensif dan berkelanjutan.
- Meningkatkan dan menguatnya peran Pokja PUG kab/Kota dibawa koordinator Bappeda sebagai Ketua Pokja dan Tim Teknis Anggaran Responsif Gender yang terdiri dari OPD Driver PUG yaitu Dinas PPPA, Inspektorat dan Badan Pengelola Keuangan Daerah agar seluruh anggota Pokja

dapat bekerja secara baik dan terencana dengan tetap mempedomani Renja Pokja dan RANDA PUG dalam setiap pelaksanaan tugasnya dan diikuti oleh seluruh OPD.

3.1 Penutup

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengarusutamaan Gender Tahun 2021 di Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban yang diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perencanaan di tahun yang akan datang.

Makassar, Januari 2021

Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel

Ir. A. Darmawan Bintang, MDevPlg
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP.19670427 199303 1 015

PROGRAM : PERENCANAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
TUJUAN : KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI
TAHUN : 2021
KELOMPOK : 5.01.02.1.01.06



KASUBAD PERENCANAAN DAN PENDANAAN
PERENCANAAN, PENGENDALIAN & EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
**BUKU PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
TAHUN ANGGARAN 2021



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPELITBANGDA)

Jl. Urip Sumoharjo No. 269 Telp.(0411) 453 486
MAKASSAR 90231

Makassar, 8 Maret 2021

Kepada

Yth. Plt. Kepala Bappelitbangda
 Prov. Sulsel
 Selaku Pengguna Anggaran

OSO / 1241 / Bappelitbangda

Permohonan Persetujuan
Pelaksanaan Kegiatan

di-

Makassar

Dengan hormat,

Yang bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : A. Rahmi Bahariawaty, P,ST., M.Si

NIP : 19650924 198903 2 007

Jabatan : Kepala Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah

Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I (IV/b)

Sesuai Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 46/ I / Tahun 2021 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Sulsel TA. 2021, dengan ini mengajukan permohonan persetujuan pelaksanaan Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi pada Kepala Sub Bidang Perencanaan Dan Pendanaan Tahun Anggaran 2021.

1. Urusan Pemerintahan	: 5.01	Perencanaan
2. Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.51.00	Bappelitbangda Prov.Sulsel
3. Program	: 5.01.02	Program Perencanaan dan
		Evaluasi Pembangunan Daerah
4. Kegiatan	: 5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan
		Pendanaan
5. Sub Kegiatan	: 5.01.02.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan
		Penetapan Dokumen
		Perencanaan Pembangunan
		Daerah Provinsi
6. Anggaran	: Rp. 2.361.037.324,	(Dua milyar tiga ratus enam
		puluh satu juta tiga puluh tujuh
		ribu tiga ratus dua puluh empat
		Rupiah)

Bersama ini terlampir Kerangka Acuan untuk menjadi bahan koreksi dan pertimbangan Bapak/Ibu.

Demikian permohonan ini kami buat untuk mendapat persetujuan Bapak/Ibu, terima kasih.

Mengetahui :

Bidang Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PTK)

(Handwritten signature)

A. Rahmi Bahariawaty, P,ST., M.Si

Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19650924 198903 2 007

Pelaksa Kegiatan

Kepala Perencanaan Dan Pendanaan

(Handwritten signature)

Andi Ihsan Natsir, SP

Pangkat : Penata Tk.I (III.d)

Nip. 19701008 200312 1 005

Pejabat yang menyetujui / menolak permohonan (Pengguna Anggaran)

(Handwritten signature)

KERANGKA ACUAN KERJA

KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI

Satuan Kerja	: Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah
Nama Program	: Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Nama SubKegiatan	: Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Jumlah Anggaran	: Rp. 2.361.037.324.- (Dua milyar tiga ratus enam puluh satu juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat Rupiah)
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	: Kabid. Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Pelaksana Kegiatan	: Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan

LATAR BELAKANG

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka melakukan perubahan yang mengandung makna adanya kemajuan/perbaikan, pertumbuhan mencapai kondisi yang lebih baik dibanding keadaan sebelumnya. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi, dan politik sampai pada perkembangan adanya penyelarasan dengan konservasi lingkungan. Nilai dalam pembangunan adalah optimalisasi sumberdaya dengan tetap menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik. Perencanaan Pembangunan Daerah secara umum merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Lebih lanjut lagi, pembangunan yang dilakukan di daerah, diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang di hadapi dan mengembangkan potensi yang dimiliki guna meningkatkan daya saing daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta harus mendukung pelaksanaan pembangunan di tingkat nasional untuk mencapai cita-cita bersama sebagai suatu bangsa.

Perencanaan pembangunan daerah secara konseptual dirancang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang diamanatkan dalam konstitusi. Pasal 260 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah provinsi Sulawesi selatan pada tahun 2021 meliputi penetapan dokumen perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Prov. Sulsel Tahun 2018-2023, Penyusunan dan Penetapan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 serta penetapan dan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Prov. Sulsel Tahun 2021.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD pada pasal 344 menyatakan bahwa penyusunan Perubahan RPJMD berlaku ketentuan mutatis mutandis terhadap penyusunan RPJMD pokok artinya tahapan dan sistematika dokumen masih tetap sama. Adapun tahapan penyusunan Perubahan RPJMD Prov. Sulsel Tahun 2018-2023 sebagai berikut: (1) Persiapan, yaitu pengumpulan data dan informasi, pembahasan dengan seluruh perangkat daerah untuk memperoleh masukan dan saran yang dituangkan dalam berita acara. (2) Perumusan Rancangan Awal, yaitu penyempurnaan naskah berdasarkan berita acara kesepakatan hasil pembahasan dengan seluruh perangkat daerah. (3) Konsultasi Publik Rancangan Awal, yaitu pembahasan dengan seluruh kepentingan untuk memperoleh masukan dan saran yang bersifat teknokratik sebagai bahan menyempurnakan rumusan rancangan awal. (4) Persetujuan Kepala Daerah terhadap Rancangan Awal yang telah disempurnakan berdasarkan berita acara kesepakatan hasil pembahasan dengan perangkat daerah. (5) Kesepakatan dengan DPRD atas Rancangan Awal yang disusun pemerintah daerah yang dirumuskan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan ketua DPRD. (6) Konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk memperoleh masukan terkait dengan pencapaian tujuan pembangunan daerah dan nasional. (7) Perumusan Rancangan, yaitu penyempurnaan rancangan awal berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Hasil Konsultasi Rancangan Awal. (8) Musrenbang RPJMD, yaitu pembahasan rancangan RPJMD dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan dan saran yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan. (9) Perumusan Rancangan Akhir, yaitu penyempurnaan rancangan berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD. (10) Pembahasan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendapatkan masukan terkait dengan substansi maupun Sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan. (11) Penetapan Perubahan RPJMD dengan Peraturan Daerah.

Penyusunan dokumen RKPD 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa RKPD disusun dengan tahapan yaitu, persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, Pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi antara dokumen perencanaan maka dilakukan kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sehingga tujuan, sasaran dan target pembangunan daerah dapat dicapai secara maksimal dan selaras dengan tujuan pembangunan nasional serta bersinergi dengan tujuan pembangunan kab/kota.

MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

1) Penyusunan Perubahan RPJMD Prov. Sulsel Tahun 2018-2023

Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025 dan menerjemahkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program prioritas daerah, program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif

2) Penyusunan RKPD Prov. Sulsel Tahun 2022

Maksud disusunnya RKPD Tahun 2022 Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 105, sebagai berikut:

- Pedoman perumusan penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah;
- Pedoman penyelarasan prioritas pembangunan Provinsi dengan kabupaten/kota; dan
- Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Dialok Anggaran Sementara (PPAS).

b. Tujuan

1) Penyusunan Perubahan RPJMD Prov. Sulsel Tahun 2018-2023

Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 disusun dengan tujuan adalah sebagai berikut:

Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD perencanaan daerah untuk satu tahun.

- Menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
- Sebagai pedoman Tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
- Menjadi instrumen bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan pemerintah daerah dalam mendukung aspirasi masyarakat serta pencapaian target kinerja program prioritas pembangunan daerah.
- Menjadi pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota.
- Menjadi dasar bagi Pemerintah Pusat dalam pengalokasian anggaran pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis prioritas nasional yang ditetapkan dalam RPJMN.
- Sebagai pedoman bagi stakeholder khususnya dalam pencapaian target kinerja program prioritas serta dukungan pendanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

2) Penyusunan RKPD Prov. Sulsel Tahun 2022

Adapun tujuan dari RKPD Provinsi Sulawesi Selatan:

- Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah;
- Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2022;
- Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsive dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
- Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- Sebagai instrument dalam melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan.

RUANG LINGKUP PELAKSANAAN

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan meliputi penetapan dokumen Peraturan Daerah Prov. Sulsel tentang Perubahan RPJMD Prov. Sulsel Tahun 2018-2023, Penetapan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dan Penetapan Perubahan Peraturan Gubernur Prov. Sulsel tentang Perubahan RKPD Tahun 2021.

Lokasi kegiatan berada di Provinsi Sulawesi Selatan dengan melibatkan 24 Kab/kota, serta melakukan konsultasi dan koordinasi ke Pemerintah Pusat dalam Hal ini Kementerian Dalam Negeri dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional serta instansi/lembaga lainnya di Pemerintah Pusat.

IV. SASARAN :

a. Target Sasaran Kegiatan :

- OPD Provinsi Sulawesi Selatan

b. Indikator Sasaran :

- Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
- Sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD perencanaan daerah untuk satu tahun.
- Menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
- Sebagai pedoman Tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
- Menjadi instrumen bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan pemerintah daerah dalam mendukung aspirasi masyarakat serta pencapaian target kinerja program prioritas pembangunan daerah.

c. Target Kinerja :

- Capaian Program : Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu, Persentase rata-rata capaian kinerja program RPJMD
- Input : adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan, misalnya jumlah dana, yaitu
(Jumlah Dana sebesar Rp. 2.361.037.324,-)
- Output : % dokumen/usulan, perencanaan dan pendanaan pembangunan yang disusun 100 % sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan
- Outcomes : Persentase Dokumen / Usulan, Perencanaan & Pendanaan Pembangunan yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku

- Kelompok Sasaran : Unit Kerja Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Serta Kabupaten dan Kota

PROGRAM

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

SUB KEGIATAN

Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi

MEKANISME PELAKSANAAN

a. Syarat-syarat penyelesaian pekerjaan

Setiap penyelesaian pekerjaan harus didasarkan atas ketentuan yang berlaku dan dilengkapi dengan bahan atau data pendukung yang berkaitan erat dengan pekerjaan.

b. Pelaksanaan Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini, maka disediakan anggaran untuk belanja barang dan jasa sesuai rincian dari masing-masing rekening kegiatan :

- Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah

Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah dalam rangka Sosialisasi, Konsultasi dan Koordinasi mengenai pelaksanaan Program-program Pembangunan yang menunjang proses Penyusunan RKPD dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan.

- Alat Tulis Kantor

Melakukan kegiatan pembelian alat tulis kantor dalam rangka menunjang proses pelaksanaan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan mendukung tugas lainnya yang diperlukan.

- Pencetakan dan Foto Copy

Melakukan sub kegiatan pencetakan dan fotocopy hasil kegiatan dalam rangka menunjang proses pelaksanaan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan mendukung tugas lainnya yang diperlukan.

- Makan dan Minum

Melaksanakan kegiatan makan dan minum dalam rangka rapat-rapat, Teknis pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi.

c. Lokasi

Provinsi Sulawesi Selatan

d. Sumber Dana

APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

VII BATASAN TANGGUNGJAWAB

Melakukan penyusunan Rancangan awal, Rancangan dan Rancangan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 dan Penyusunan Dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 serta Pembinaan ke Kabupaten/Kota serta konsultasi dan kordinasi sebelum penyusunan Rancangan Awal dan Rancangan Akhir pada Kementerian dan Instansi terkait lainnya.

VIII JADWAL KEGIATAN KERJA TIM

Jadwal Kerja tim mulai berlaku Januari s/d Desember 2021.

No.	Uraian Kegiatan	Bulan Pelaksanaan
1	Persiapan	Januari
2	Pembentukan Tim Penyusun	Januari-Februari
3	Penyusunan Rancangan Awal	Februari-Maret
4	Penyusunan Rancangan	Maret-April
5	Pelaksanaan Musrenbang	April
6	Penyusunan Rancangan Akhir	Mei-Juni
7	Penetapan Perda	Juli

X. **RENCANA ANGGARAN BIAYA**

Rencana Anggaran Biaya Sub Kegiatan ini sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Bappelitbangda provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 yaitu sebesar Rp 2.361.037.324,- (Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Empat Rupiah)

XI. **PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja/Proposal (TOR) ini disusun untuk dapat dipedomani dalam melakukan Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi.

Makassar,

Mengetahui

Selaku Pelaksana Kegiatan

Kabid. Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah

Selaku PPTK,



A. Rahmi Bahariwaty P. ST., M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19650924 198903 2 007

Kasubid Perencanaan Dan Pendanaan



Andi Ikhsan Natsir, SP

Pangkat : Penata Tk.I (III.d)



Nip. 19701008 200312 1 005

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, bahwa dalam rangka pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi pada Sub Bidang Perencanaan Dan Pendanaan Bidang perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2021, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktik KKN;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib / berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pelaksanaan kegiatan ini;
3. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini, saya berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan dan professional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumberdaya secara optimal untuk memberikan hasil kerja yang terbaik mulai dari persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta tuntutan ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Makassar.

1	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	A. Rahmi Bahariwaty P, ST., M.Si	
2	Kasubid Perencanaan Dan Pendanaan	Andi Ikhsan Natsir, SP	

**DAFTAR RENCANA TAHUNAN BELANJA BARANG DAN JASA
GOLONGAN : CETAKAN DAN PENGGANDAAN**

JENIS BELANJA : BELANJA DAERAH
 BELANJA : BELANJA LANGSUNG
 JENIS BELANJA : BELANJA BARANG DAN JASA

PROPINSI :
 NAMA UNIT / SATUAN KERJA :
 NAMA UNIT SUB KEGIATAN :
 TAHUN ANGGARAN :

: SULAWESI SELATAN
 : BAPPETITBANGDA PROPINSI SULAWESI SELATAN
 : KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 DAERAH PROVINSI :
 : 2021

Nomor Kode Rekening	Nama Kegiatan	Satuan	Jumlah Kebutuhan Selama TA. Yang Lalu	Banyaknya yang Dibutuhkan		Harga Standar		Perhitungan	Kapan dibutuhkan Tg/Bln/ Tahun	Dasar dan Alasan Kebutuhan	Ket
				Satuan	Volume	Satuan Rp.	Jumlah Rp.				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5 1 02	BELANJA BARANG DAN JASA										
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Mabis										
5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak dan Penggandaan						210,851,300	Cetakan dan Penggandaan	Januari, Maret, April, Juli, Nov, Des		
	Fotocopy	Lembar		Lembar	160,171	300	48,051,700				
	Jilid Aneka	Rangkap		Rangkap	30	50,000	1,500,000				
	Jilid Biasa	Buku		Buku	100	25,000	2,500,000				
	Jilid Spiral	Buku		Buku	30	50,000	1,500,000				
	Cetak Buku RP/RKD Pokok/Perubahan	Buku		Buah	20	2,500,000	50,000,000				
	Cetak Buku RUPD Perusahaan	Buku		Buah	15	2,500,000	37,500,000				
	Cetak Buku RUPD Paktor	Buku		Buah	20	2,500,000	50,000,000				
	Cetak sertifikat Mutu/embangda RUPD	Buku		Buah	400	30,000	12,000,000				
	Cetak sertifikat Forum Konsultasi Publik	Buku		Buah	250	30,000	7,500,000				
				JUMLAH			210,851,300				

**DAFTAR RENCANA TAHUNAN BELANJA BARANG DAN JASA
GOLONGAN : MAKAN DAN MINUM**

N BELANJA : BELNJA DAERAH
 BELANJA : BELANJA LANGSUNG
 AN JENIS BEL. : BELANJA BARANG DAN JASA

PROPINSI :
 NAMA UNIT / SATUAN KERJA :
 NAMA UNIT SUB KEGIATAN :
 TAHUN ANGGARAN :

: SULAWESI SELATAN
 : BAPPETITBANGDA PROPINSI SULAWESI SELATAN
 : KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 DAERAH PROVINSI : 2021

Nomor Kode Rekening	Nama Kegiatan	Satuan	Jumlah Kebutuhan Selama TA. Yang Lalu	Banyaknya yang Dibutuhkan		Harga Standar		Peruntukan	Kapan dibutuhkan Tgl/Bln/ Tahun	Dasar (ln) Alasan Kebutuhan	K + I
				Satuan	Volume	Satuan Rp.	Jumlah Rp.				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5 1 02	BELANJA BARANG DAN JASA										
5 1 02 01 01	Belanja Makan dan Minum						600,750,000	Makan dan Minum Rapat	Januari Maret, Juli dan Oktober		
5 1 02 01 01 0057	Belanja Makan dan Minum Rapat										
	FullBoard	Orang/Hari		Orang/Hari	35	750,000	26,250,000				
	FullDay	Orang/Hari		Orang/Hari	900	320,000	288,000,000				
	HalfDay	Orang/Hari		Orang/Hari	1,000	250,000	250,000,000				
	Meal Dos	Orang/bali		Dos	900	48,000	24,000,000				
	Snack Dos	Orang/kali		Dos	500	25,000	12,500,000				
						JUMLAH	600,750,000				

**DAFTAR RENCANA TAHUNAN BELANJA BARANG DAN JASA
GOLONGAN : JASA KANTOR**

BELANJA : BELANJA DAERAH
BELANJA : BELANJA LANGSUNG
JENIS BEL : BELANJA BARANG DAN JASA

PROPINSI
 NAMA UNIT / SATUAN KERJA
 NAMA UNIT SUB KEGIATAN
 TAHUN ANGGARAN

: SULAWESI SELATAN
 : BAPPELITBANGDA PROPINSI SULAWESI SELATAN
 : KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI
 : 2021

Nomor Kode Rekening	Nama Kegiatan	Satuan	Jumlah Kebutuhan Selama TA. Yang Lalu	Banyaknya yang Dibutuhkan		Harga Standar		Peruntukan	Kapan dibutuhkan Tg/Bln/ Tahun	Dasar dan Alasan Kebutuhan	Ket	
				Satuan	Volume	Satuan Rp.	Jumlah Rp.					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
5 1 02	BELANJA BARANG DAN JASA											
5 1 02 01 01	Belanja Jasa Kantor											
5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia						131,500,000			Narasumber		
	Narasumber Pembahas/Pembahas/Pembahas Pembahas Utama Berstatus Non PNS (Pakar/Pengamat/Pembicara Khusus)	org/jam		org/jam	25	1,200,000	30,000,000			dan Moderator		
	Narasumber Pembahas (Moderator)	org/kali		org/kali	10	700,000	7,000,000					
	Narasumber Pembahas/Pembahas/Pembahas Pembahas Utama Berstatus Non PNS (Mentari/Pejabat Berhajat Mentari/Pejabat Negara Lainnya)	org/kali		org/kali	15	1,500,000	22,500,000					
	Narasumber Pembahas/Pembahas/ Moderator/Pembawa Acara/Panitia Berstatus PNS (Pegawai Eselon III Ke bawah dan atau Yang Diasterikan)	org/kali		org/kali	80	900,000	72,000,000					
							JUMLAH	131,500,000				

**DAFTAR RENCANA TAHUNAN BELANJA BARANG DAN JASA
GOLONGAN : JASA KANTOR**

DAFTAR BELANJA
JENIS BEL

: BELNJA DAERAH
: BELANJA LANGSUNG
: BELANJA BARANG DAN JASA

PROVINSI
NAMA UNIT / SATUAN KERJA
NAMA UNIT SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN

: SULAWESI SELATAN
: BAPPELITBANGDA PROPINSI SULAWESI SELATAN
: KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVI
: 2021

D. ut	Nomor Kode Rekening	Nama Kegiatan	Satuan	Jumlah Kebutuhan Selama TA. Yang Laku	Banyaknya yang Dibutuhkan		Harga Standar		Perantukan	Kapan dibutuhkan Tg/Bln/ Tahun	Dasar dan Alasan Kebutuhan	Ket
					Satuan	Volume	Satuan Rp.	Jumlah Rp.				
					6	7	8	9				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	8 1 02	BELANJA BARANG DAN JASA							Jasa Administrasi	Januari, Februari Maret, April, Mei Juni, Juli, Agustus September, November Desember		
	8 1 02 01 01	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Bulan		Bulan	12	3,165,876	37,990,512				
	5 1 02 02 01 0026	Jasa Tenaga Pendukung Lainnya										
							SUMLAH					
								37,990,512				

**DAFTAR RENCANA TAHUNAN BELANJA BARANG DAN JASA
GOLONGAN : JASA KANTOR**

BIDANG BELANJA : BELANJA DAERAH
 PROPINSI : SULAWESI SELATAN
 NIS BELANJA : BELANJA LANGSUNG
 NAMA UNIT / SATUAN KERJA : BAPPALITBANGDA PROPINSI SULAWESI SELATAN
 WILAYAH JENIS BEL : BELANJA BARANG DAN JASA
 NAMA UNIT SUB KEGIATAN : KOOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PRON
 TAHUN ANGGARAN : 2021

No. Urut	Nomor Kode Rekening	Nama Kegiatan	Satuan	Jumlah Kebutuhan Selama TA. Yang Lalu	Banyaknya yang Dibutuhkan		Harga Standar		Perencanaan	Kapan dibutuhkan Tg/Bln/ Tahun	Dasar dan Alasan Kebutuhan	Ket
					Satuan	Volume	Satuan Rp.	Jumlah Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	5 1 02	BELANJA BARANG DAN JASA										
	5 1 02 01 01	Belanja Jasa Tenaga Administrasi							Jasa Administrasi	Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, November, Desember		
	5 1 02 02 01 0026	Jasa Tenaga Perdukong Lainnya	Bulan		Bulan	12	3,165,876	37,990,512				
							JUMLAH					
								37,990,512				

**DAFTAR RENCANA TAHUNAN BELANJA BARANG DAN JASA
GOLONGAN : JASA KANTOR**

BELANJA : BELANJA DAERAH
BELANJA : BELANJA LANGSUNG
JENIS BEL. : BELANJA BARANG DAN JASA

PROPINSI
NAMA UNIT / SATUAN KERJA

: SULAWESI SELATAN
: BAPPELITBANGDA PROPINSI SULAWESI SELATAN

NAMA UNIT SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN

: KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBIAYAAN DAERAH
: 2021

Nomor Kode Rekening	Nama Kegiatan	Sesuai	Jumlah Kebutuhan Selama TA. Yang Laku	Banyaknya yang Dibutuhkan		Harga Standar		Peruntukan	Kapan dibutuhkan Tgl/Bln/Tahun	Dasar dan Alasan Kebutuhan	R. R.
				Satuan	Volume	Sesuai Rp.	Jumlah Rp.				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5 1 02	BELANJA BARANG DAN JASA										
5 1 02 01 01	Belanja Jasa Kantor										
5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Hlon/Reklama, Film, dan Perseorotan	Bulan		Bulan	12	1,165,876	37,990,512	Jasa Film	Maret, April, Mei		
	Pagar TV (BARANG LANGSUNG)	Per Tayang/jam		Per Tayang/jam	3	10,000,000	30,000,000		Nov dan Des		
						JUNJAH	37,990,512				

**DAFTAR RENCANA TAHUNAN BELANJA BARANG DAN JASA
GOLONGAN : JASA KANTOR**

BELANJA : BELANJA DAERAH
 ANJIA : BELANJA LANGSUNG
 ENIS BEL. : BELANJA BARANG DAN JASA

PROVINSI : SULAWESI SELATAN
 NAMA UNIT / SATUAN KERJA : BAPPELITBANGDA PROPINSI SULAWESI SELATAN

NAMA UNIT SUB KEGIATAN : KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PRO
 TAHUN ANGGARAN : 2021

Nomor Kode Rekening	Nama Kegiatan	Satuan	Jumlah Kebutuhan Selama TA. Yang Lalu	Banyaknya yang Dibutuhkan		Harga Standar		Peruntukan	Kapan dibutuhkan Tgl/Bln/ Tahun	Dasar dan Alasan Kebutuhan	Ket
				Satuan	Volume	Satuan Rp.	Jumlah Rp.				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 02	BELANJA BARANG DAN JASA										
1 02 02 07	Belanja Sewa Alat Tulis Lainnya							Jasa Sewa			
1 02 02 07 0013	Belanja Sewa Audio Visual						225,000,000		Januari s/d Des		
	Sewa Audio Visual-Forum Konsultasi Publik	Paket		Paket	1	100,000,000	100,000,000				
	Sewa Audio Visual-Penyelenggaraan Musyawarah	Paket		Paket	1	125,000,000	125,000,000				
						JUMLAH	225,000,000				

**DAFTAR RENCANA TAHUNAN BELANJA BARANG DAN JASA
GOLONGAN : JASA KANTOR**

BELANJA : BELANJA DAERAH
 BELANJA : BELANJA LANGSUNG
 JENIS BEL : BELANJA BARANG DAN JASA

PROPINSI : SULAWESI SELATAN
 NAMA LINT / SATUAN KERJA : BAPPELITBANGDA PROPINSI SULAWESI SELATAN
 NAMA UNIT SUB KEGIATAN : KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI
 TAHUN ANGGARAN : 2021

Nomor Kode Rekening	Nama Kegiatan	Satuan	Jumlah Kebutuhan Selama TA. Yang Lalu	Banyaknya yang Dibutuhkan		Harga Standar		Peruntukan	Kapan dibutuhkan Tg/Bln/ Tahun	Dasar dan Alasan Kebutuhan	K e
				Satuan	Volume	Satuan Rp.	Jumlah Rp.				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5 1 02	BELANJA BARANG DAN JASA										
5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan								Jasa Sewa		
5 1 02 02 05 0043	Belanja Sewa Hotel						20,000,000		Januari s/d Des		
	Sewa Hotel-Taru Murenabang	Orang/Hari		Orang/Hari	10	2,000,000	20,000,000				
							JUMLAH	20,000,000			

**DAFTAR RENCANA TAHUNAN BELANJA BARANG DAN JASA
GOLONGAN : PERJALANAN DINAS**

BELANJA : BELANJA DAERAH
 BELANJA : BELANJA LANGSUNG
 JENIS BEL. : BELANJA BARANG DAN JASA

PROVINSI :
 NAMA UNIT / SATUAN KERJA :
 NAMA UNIT SUB KEKGIATAN :
 TAHUN ANGGARAN :

SULAWESI SELATAN :
 BAPPELITBANGDA PROPINSI SULAWESI SELATAN :
 KOORDINASI PENELAHAAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN EX-GRATIS :
 KEBIJAKAN LAINNYA :
 2021

Nomor Kode Rekening	Nama Kegiatan	Satuan	Jumlah Kebutuhan Selama TA. Yang Lalu	Banyaknya yang Dibutuhkan		Harga Standar		Peruntukan	Kapan dibutuhkan Tgl/Bln/ Tahun	Dasar dan Alasan Kebutuhan	Ket
				Satuan	Volume	Satuan Rp.	Jumlah Rp.				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5 1 02	BELANJA BARANG DAN JASA										
5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat										
5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Dalam Daerah										
	Hadiah Lomba	Buah		Buah	9	2.500,000	22.500,000	Hadiah Lomba	April, Mei, Juli		
						JUMLAH:	22.500,000				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021	

Nomor DPA	: DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.51.00/001/2021
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 3.01 PERENCANAAN
Program	: 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
Sasaran Program	:
Capaian Program	: (Indikator) (Target) Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu, Persentase rata-rata capaian kinerja program RPJMD 100 %
Kegiatan	: 5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.51.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Unit	: 5.01.5.05.0.00.51.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2021	: Rp2.892.745.848 (dua miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah)
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu, Persentase rata-rata capaian kinerja program RPJMD	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp2.892.745.848
Keluaran	% dokumen/usulan, perencanaan dan pendanaan pembangunan yang disusun sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan	100 %
Hasil	Persentase Dokumen / Usulan, Perencanaan & Pendanaan Pembangunan yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Seluruh Perangkat Daerah di Sulsel

Sub Kegiatan	5.01.02.1.01.02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Lokasi	: Dalam dan Luar Provinsi Sulawesi Selatan	
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember	
Keluaran Sub Kegiatan	(Indikator)	(Target)
	Jumlah Dokumen Usulan Perencanaan dan Pembangunan yang tersusun	1 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp531.708.524
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp531.708.524
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp70.622.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Mabis					Rp70.622.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor					Rp19.872.500
	[#] alat tulis kantor					Rp19.872.500
	(-)					
	Amplop Spesifikasi : Mambo BA 90/80	100 Buah	Dos	22.000	0	Rp2.200.000
	Ballpoint Pilot Spesifikasi : Baliner	10 Dos	Lusin	212.500	0	Rp2.125.000
	Bola Dunia Folia Spesifikasi : (F4) 70 gsm	10 Dos	Dos	324.000	0	Rp3.240.000
	Bola Dunia Kwarc Spesifikasi : (A4) 70 gsm	5 Dos	Dos	287.500	0	Rp1.437.500
	Map Spesifikasi : Snelheker Seagull Lubang	100 Buah	Buah	20.000	0	Rp2.000.000
	Map Folia Spesifikasi : Karton Biasa	10 Dos	Dos	92.000	0	Rp920.000
	Tinta Epson T06641 / 42 / 43 / 44 Spesifikasi : L100, L110, L120, L200, L210, L220, L300, L355, L350 / L455 / L1300 (Black T6641, Cyan T6642, Magenta T6643, Yellow T6644)	50 Unit	Unit	121.000	0	Rp6.050.000
	TONER HP Q2612A (12A) Spesifikasi : HP Toner Laserjet 1010/1012/1015	2 Buah	Unit	950.000	0	Rp1.900.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp14.750.000
	[#] Cetakan					Rp6.500.000
	(-)					
	Cetakan Undangan Spesifikasi : Dinas + Sampul	500 Lembar	Lembar	3.000	0	Rp1.500.000
	Cetak Map Spesifikasi : Berwarna Logo Lambang Daerah	100 Lembar	Lembar	15.000	0	Rp1.500.000
	Cetak Map Spesifikasi : Batik	200 Lembar	Buah	17.500	0	Rp3.500.000
	[#] penggandaan					Rp8.250.000
	(-)					
	Fotocopy Spesifikasi : Folia	15000 Lembar	Lembar	300	0	Rp4.500.000
	Jilid Spesifikasi : Biasa	50 Buah	Buku	25.000	0	Rp1.250.000
	Jilid Spesifikasi : Spiral	50 Buah	Buku	50.000	0	Rp2.500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp36.000.000
	[#] Makan Minum Rapat					Rp36.000.000
	(-)					
	Nasi Dos Spesifikasi : Rapat Di Lingkup OPD Yang Bersangkutan	500 Dos	Orang/Kali	48.000	0	Rp24.000.000
	Snack Dos Spesifikasi : Umum	500 Dos	Orang	24.000	0	Rp12.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp109.981.024
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp109.981.024
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp34.000.000
	[#]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Narasumber Pembahas/Pembahas/ Moderator/Pembawa Acara/Panitia Berstatus PNS Spesifikasi : Moderator	10 Orang / Kali	Orang/ Kali	700.000	0	Rp7.000.000
	Narasumber Pembahas/Pembahas/ Moderator/Pembawa Acara/Panitia Berstatus PNS Spesifikasi : Pejabat Eselon III Ke bawah dan atau Yang Disetarakan	30 Orang / Jam	Orang/ Jam	900.000	0	Rp27.000.000
5.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp37.990.512
	{0} Jasa Non PNS					Rp37.990.512
	[-]					
	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Lainnya Spesifikasi : Sesuai Upah Minimum Provinsi	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	3.165.876	0	Rp37.990.512
5.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp37.990.512
	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Lainnya Spesifikasi : Sesuai Upah Minimum Provinsi	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	3.165.876	0	Rp37.990.512
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp351.105.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp351.105.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp351.105.000
	{0} Perjalan Dinas Dalam Daerah					Rp128.750.000
	[-]					
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Eselon IV dan Staf Golongan III - Sedang	10 Orang / Kali	Orang / Kali	2.140.000	0	Rp21.400.000
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : PNS Golongan II, I dan PPPK - Sedang	5 Orang / Kali	Orang / Kali	1.940.000	0	Rp9.700.000
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Eselon III dan Staf Golongan IV - Jauh	10 Orang / Kali	Orang / Kali	3.110.000	0	Rp31.100.000
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : PNS Golongan II, I dan PPPK - Jauh	5 Orang / Kali	Orang / Kali	2.810.000	0	Rp14.050.000
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Eselon III dan Staf Golongan IV - Sedang	10 Orang / Kali	Orang / Kali	2.240.000	0	Rp22.400.000
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Eselon IV dan Staf Golongan III - Jauh	10 Orang / Kali	Orang / Kali	3.010.000	0	Rp30.100.000
	{0} Perjalan Dinas Luar Daerah					Rp222.355.000
	[-]					
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : PNS Golongan II, I dan PPPK - Sedang	5 Orang / Kali	Orang / Kali	8.515.000	0	Rp42.575.000
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Eselon III dan Staf Golongan IV -	10 Orang / Kali	Orang / Kali	9.197.000	0	Rp91.970.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Eselon IV dan Staf Golongan III - Sedang	10 Orang / Kali	Orang / Kali	8.781.000	0	Rp87.810.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp531.708.524

Sub Kegiatan : 5.01.02.1.01.06 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Dalam dan Luar Provinsi Sulawesi Selatan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) Jumlah Dokumen Usulan Perencanaan dan Pembangunan yang ditetapkan (Target) 2 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.361.037.324
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.361.037.324
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp922.446.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp922.446.300
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp92.595.000
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp12.595.000
	[-]					
	Bola Dunia Folio Spesifikasi : (F4) 70 gsm	30 Dos	Dos	324.000	0	Rp9.720.000
	Bola Dunia Kwarto Spesifikasi : (A4) 70 gsm	10 Dos	Dos	287.500	0	Rp2.875.000
	[#] Peserta Musrenbang					Rp80.000.000
	[-]					
	Seminar Kk Spesifikasi :	200 Buah	kit	400.000	0	Rp80.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp210.851.300
	[#]					
	[-]					
	Fotocopy Spesifikasi : Folio	160171 Lembar	Lembar	300	0	Rp48.051.300
	Jilid Spesifikasi : Antero	30 Buku	Rangkap	60.000	0	Rp1.800.000
	Jilid Spesifikasi : Biasa	100 Buku	Buku	25.000	0	Rp2.500.000
	Jilid Spesifikasi : Spiral	30 Buku	Buku	50.000	0	Rp1.500.000
	[#] Buku Perubahan RPJMD					Rp50.000.000
	[-]					
	Cetak Buku RPJMD Pokok/Perubahan Spesifikasi :	20 Buku	Buku	2.500.000	0	Rp50.000.000
	[#] Buku RKP					Rp87.500.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak Buku RKPD Perubahan Spesifikasi :	15 Buku	Buah	2.500.000	0	Rp37.500.000
	Cetak Buku RKPD Pokok Spesifikasi :	20 Buku	Buah	2.500.000	0	Rp50.000.000
	[#] Musrenbang RKPD					Rp12.000.000
	(-)					
	Cetak Sertifikat Spesifikasi :	400 Lembar	Lembar	30.000	0	Rp12.000.000
	[#] Peserta Forum Konsultasi Publik					Rp7.500.000
	(-)					
	Cetak Sertifikat Spesifikasi :	250 Lembar	Lembar	30.000	0	Rp7.500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp619.000.000
	[#]					
	(-)					
	FullBoard Spesifikasi : Rapat Di luar Gedung Pemerintah atau Tempat lainnya dalam Wilayah Provinsi	60 Orang / Hari	Orang/Hari	750.000	0	Rp45.000.000
	[#] Makanan dan Minuman Rapat					Rp574.000.000
	(-)					
	Belanja Makanan dan Minuman Spesifikasi : Nasi Dos	500 Orang / Kali	Dos	48.000	0	Rp24.000.000
	FullDay Spesifikasi : Rapat Di luar Gedung Pemerintah atau Tempat lainnya dalam Wilayah Provinsi	900 Orang / Kali	Orang/Hari	320.000	0	Rp288.000.000
	HalfDay Spesifikasi : Rapat Di luar Gedung Pemerintah atau Tempat lainnya dalam Wilayah Provinsi	1000 Orang / Kali	Orang/Hari	250.000	0	Rp250.000.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Di Lingkup OPD Yang Bersangkutan	500 Orang / Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp12.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp670.891.824
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp425.891.824
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp188.100.000
	[#] Narasumber Non PNS					Rp93.600.000
	(-)					
	Narasumber Non PNS Spesifikasi :	58 Orang / Jam	Orang/jam	1.200.000	0	Rp69.600.000
	Narasumber Pembahas/Pemater/Pemakalah/Pembahas Utama Berstatus Non PNS Spesifikasi : Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus	20 Orang / Jam	Orang/Jam	1.200.000	0	Rp24.000.000
	[#] Narasumber Pembahas/Pembahas/ Moderator/Pembawa Acara/Panitia Berstatus PNS					Rp94.500.000
	(-)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Narasumber Pembahas/Pemateri/Pemakalah/Pembahas Utama Berstatus Non PNS Spesifikasi : Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	15 Orang /jam	Orang/jam	1.500.000	0	Rp22.500.000
	Narasumber Pembahas/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Berstatus PNS Spesifikasi : Pejabat Eselon III Ke bawah dan atau Yang Disetarakan	80 Orang /jam	Orang/ jam	900.000	0	Rp72.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp37.990.512
	[#] Jasa Tenaga Non PNS					Rp37.990.512
	[-]					
	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Lainnya Spesifikasi : Sesuai Upah Minimum Provinsi	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	3.165.876	0	Rp37.990.512
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp37.990.512
	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Lainnya Spesifikasi : Sesuai Upah Minimum Provinsi	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	3.165.876	0	Rp37.990.512
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemodelan					Rp20.000.000
	[#] Musrenbang RKP					Rp20.000.000
	[-]					
	Fajar TV Spesifikasi : SIARAN LANGSUNG	1 Per Tayang x 2 jam	Tayang	10.000.000	0	Rp20.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp141.810.000
	[#]					
	[-]					
	Satuan Uang Lembur ASN Spesifikasi : Golongan IV	1750 Orang / jam	Orang/jam	25.000	0	Rp43.750.000
	[#] Lembur PNS					Rp98.060.000
	[-]					
	Satuan Uang Lembur ASN Spesifikasi : Golongan III	2500 Orang / jam	Orang / jam	20.000	0	Rp50.000.000
	Satuan Uang Makan Lembur ASN Spesifikasi : Golongan III	15 Orang x 60 Hari	Orang/Hari	37.000	0	Rp33.300.000
	Satuan Uang Makan Lembur ASN Spesifikasi : Golongan IV	5 Orang x 60 Hari	Orang/Hari	41.000	0	Rp14.760.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp20.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp20.000.000
	[#]					
	[-]					
	Sewa Hotel Spesifikasi : Tamu Musrenbang	10 Orang / Hari	O/H	2.000.000	0	Rp20.000.000
5.1.02.02.67	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya					Rp225.000.000
5.1.02.02.67.0019	Belanja Sewa Audio Visual					Rp225.000.000
	Sewa Audio Visual Spesifikasi : Forum konsultasi Publik	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp100.000.000
	[#] Musrenbang RKP					Rp125.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	(-)					
	Sewa Audio Visual Spesifikasi : Penyelenggaraan Musranbang	1 Paket	Paket	125.000.000	0	Rp125.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp745.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp745.200.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp507.735.000
	(#) perjalanan dinas dalam daerah					Rp285.380.000
	(-)					
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Eselon III dan Staf Golongan IV - Jauh	10 Orang / Kali	Orang / Kali	3.110.000	0	Rp31.100.000
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Eselon III dan Staf Golongan IV - Dekat	10 Orang / Kali	Orang / Kali	2.000.000	0	Rp20.000.000
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Eselon IV dan Staf Golongan III - Dekat	10 Orang / Kali	Orang / Kali	1.900.000	0	Rp19.000.000
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : PNS Golongan II, I dan PPPK - Dekat	10 Orang / Kali	Orang / Kali	1.700.000	0	Rp17.000.000
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : PNS Golongan II, I dan PPPK - Sedang	10 Orang / Kali	Orang / Kali	1.940.000	0	Rp19.400.000
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Eselon IV dan Staf Golongan III - Sedang	10 Orang / Kali	Orang / Kali	2.140.000	0	Rp21.400.000
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Eselon III dan Staf Golongan IV - Sedang	10 Orang / Kali	Orang / Kali	2.240.000	0	Rp22.400.000
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : PNS Golongan II, I dan PPPK - Jauh	5 Orang / Kali	Orang / Kali	2.810.000	0	Rp14.050.000
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Eselon IV dan Staf Golongan III - Jauh	10 Orang / Kali	Orang / Kali	12.103.000	0	Rp121.030.000
	(#) perjalanan dinas luar daerah					Rp222.355.000
	(-)					
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Eselon IV dan Staf Golongan III - Sedang	10 Orang / Kali	Orang / Kali	8.781.000	0	Rp87.810.000
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : PNS Golongan II, I dan PPPK - Sedang	5 Orang / Kali	Orang / Kali	8.515.000	0	Rp42.575.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Eselon III dan Staf Golongan IV - Sedang	10 Orang / Kali	Orang / Kali	9.197.000	0	Rp91.970.000
3.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap					Rp237.465.000
	(#) perjalanan dinas dalam daerah					Rp184.250.000
	(-)					
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Tetap (Dalam Daerah) Spesifikasi : PNS Golongan II, I dan PPPK - Jauh	5 Orang / Kali	Orang / Kali	2.810.000	0	Rp14.050.000
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Tetap (Dalam Daerah) Spesifikasi : Eselon III dan Staf Golongan IV - Dekat	5 Orang / Kali	Orang / Kali	2.000.000	0	Rp10.000.000
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Tetap (Dalam Daerah) Spesifikasi : PNS Golongan II, I dan PPPK - Sedang	5 Orang / Kali	Orang / Kali	1.940.000	0	Rp9.700.000
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Tetap (Dalam Daerah) Spesifikasi : Eselon IV dan Staf Golongan III - Dekat	5 Orang / Kali	Orang / Kali	1.900.000	0	Rp9.500.000
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Tetap (Dalam Daerah) Spesifikasi : Eselon IV dan Staf Golongan III - Sedang	5 Orang / Kali	Orang / Kali	2.140.000	0	Rp10.700.000
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Tetap (Dalam Daerah) Spesifikasi : Eselon III dan Staf Golongan IV - Jauh	5 Orang / Kali	Orang / Kali	3.110.000	0	Rp15.550.000
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Tetap (Dalam Daerah) Spesifikasi : PNS Golongan II, I dan PPPK - Dekat	5 Orang / Kali	Orang / Kali	1.700.000	0	Rp8.500.000
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Tetap (Dalam Daerah) Spesifikasi : Eselon III dan Staf Golongan IV - Sedang	5 Orang / Kali	Orang / Kali	2.240.000	0	Rp11.200.000
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Tetap (Dalam Daerah) Spesifikasi : Eselon IV dan Staf Golongan III - Jauh	5 Orang / Kali	Orang / Kali	3.010.000	0	Rp15.050.000
	(#) perjalanan dinas luar daerah					Rp133.215.000
	(-)					
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Tetap (Luar Daerah) Spesifikasi : Eselon IV dan Staf Golongan III - Sedang	5 Orang / Kali	Orang / Kali	8.831.000	0	Rp44.155.000
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Tetap (Luar Daerah) Spesifikasi : PNS Golongan II, I dan PPPK - Sedang	5 Orang / Kali	Orang / Kali	8.565.000	0	Rp42.825.000
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Tetap (Luar Daerah) Spesifikasi : Eselon III dan Staf Golongan IV - Sedang	5 Orang / Kali	Orang / Kali	9.247.000	0	Rp46.235.000

Kode	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp22.500.000
521	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp22.500.000
501.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp22.500.000
	[#]					
	(-)					
	Piala Lomba Spesifikasi : Logam Kuningan Metal Set	9	Buah	2.500.000	0	Rp22.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp2.361.037.324
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp2.892.745.848

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Rp795.431.171
Rp12.663.504
Rp12.663.504
Rp1.056.124.829
Rp12.663.504
Rp12.663.504
Rp555.263.504
Rp12.663.504
Rp12.663.504
Rp384.618.312
Rp12.663.504
Rp12.663.504
Rp2.892.745.848

Makassar, Tanggal 31 Desember 2020

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Junaedi, S.Sos, MH.
NIP. 197606012006041017

Mengesahkan,
PPKD

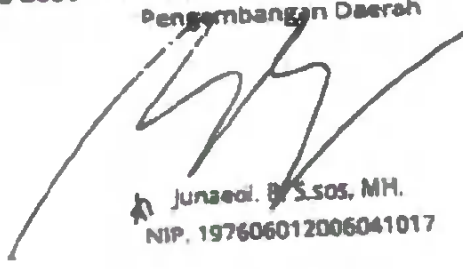
Drs. H. Muhammad Rasyid
NIP. 196412311992031123

Tim Anggaran Pemerintah Daerah		Tanda Tangan	
Nama	NIP	Jabatan	
Junaedi B, S.Sos, MH.	19760601 200604 1 017	Pj. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
Drs. H. Muhammad Rasyid	19641231 199203 2 123	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
Bani Pudjastuti, SKM., M.Kes	19700124 199311 2 001	Kepala Biro Pengadaan Barang / Jasa	
Andi Mirna, SH	19871008 199001 2 003	Kepala Biro Organisasi	

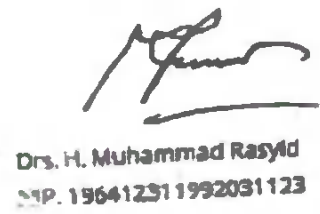
Kode	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp22.500.000
01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp22.500.000
01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perimbangan					Rp22.500.000
	[#]					
	[-]					
	Piala Lomba Spesifikasi : Logam Kuningan Metal Set	9	Buah	2.500.000	0	Rp22.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp2.361.097.324
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp2.892.745.848

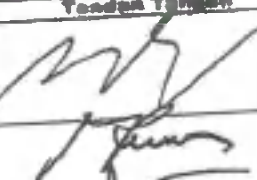


Rencana Penarikan Dana per Bulan	
	Rp795.431.171
	Rp12.663.504
	Rp12.663.504
	Rp1.056.124.829
	Rp12.663.504
	Rp12.663.504
	Rp555.263.504
	Rp12.663.504
	Rp12.663.504
	Rp384.618.312
	Rp12.663.504
	Rp12.663.504
Jumlah	Rp2.892.745.848

Makassar, Tanggal 31 Desember 2020
 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah


 Junardi, B. S.Sos, MH.
 NIP. 197606012006041017

Mengesahkan
 PPKD


 Drs. H. Muhammad Rasyid
 NIP. 196412311992031123

Tim Anggaran Pemerintah Daerah		Jabatan	Tanda Tangan
Nama	NIP		
Junardi B. S. Sos, MH.	19760601 200604 1 017	Pd. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
Drs. H. Muhammad Rasyid	19641231 199203 2 123	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
Seri Pudjiasburi, SKM, M.Kes	19700124 199311 2 001	Kepala Biro Pengadaan Barang / Jasa	
Andi Mirna, S.P	19671006 199301 2 002	Kepala Biro Organisasi	